

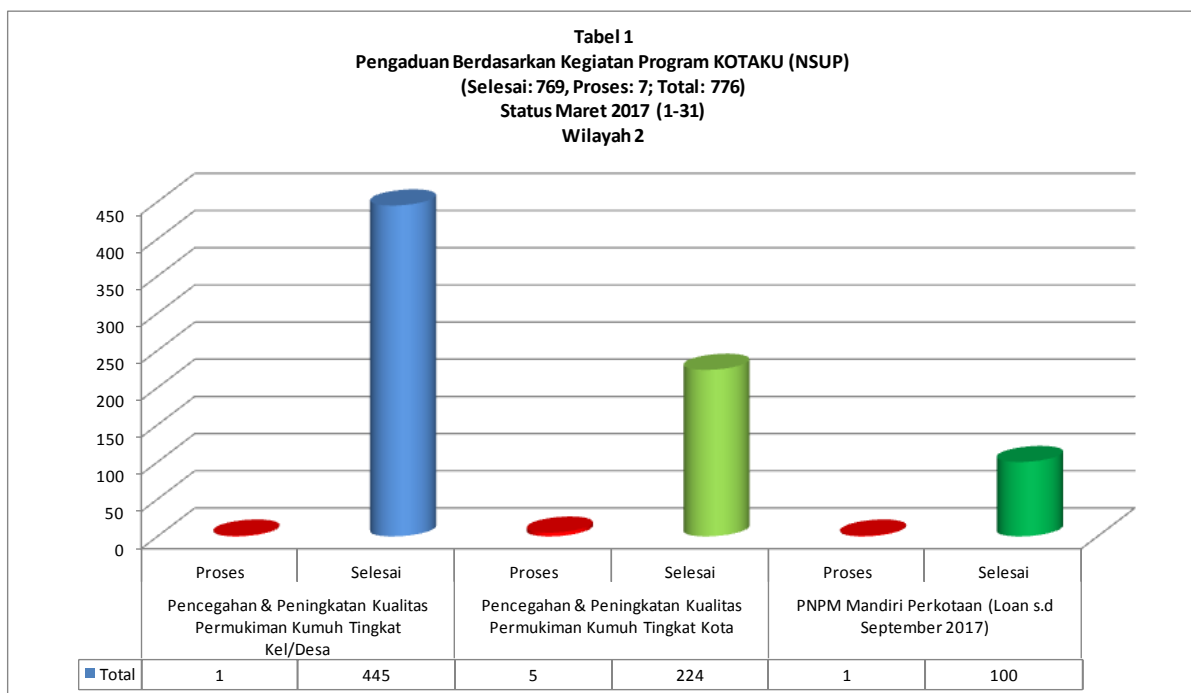
**Progres PPM Program KOTAKU (NSUP)
(Kota Tanpa Kumuh)
Periode Maret 2017
Wilayah 2
(OSP 5, OSP 6, OSP 7, OSP 8, OSP 9)**

Pendahuluan

Progres ini merupakan rekapitulasi dokumen hasil PPM di Program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) wilayah 2. Adapun dalam mengelola data hasil PPM ini menggunakan manual Ms. Excel, karena aplikasi SIM PPM direncanakan ke depan berbasis on-line dan segera diluncurkan.

Pada bulan Maret 2017, total pengaduan yang telah dikelola di seluruh program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) wilayah 2 (dua) berjumlah 776 pengaduan (selesai 769 (99%), proses 7 (1%) pengaduan).

Progres pengaduan di bulan Maret 2017 antara lain (lihat tabel 1) adalah berhubungan

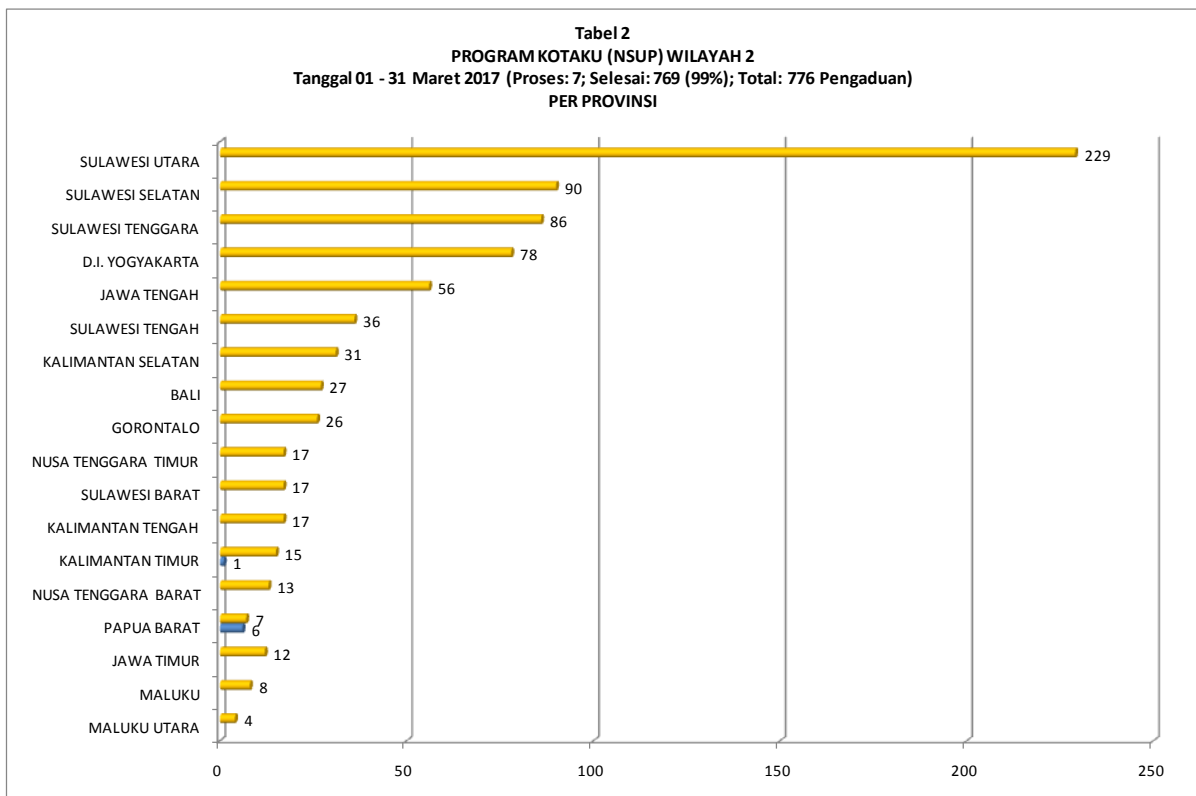


dengan pelaksanaan kegiatan program KOTAKU pencegahan & peningkatan kumuh tingkat kota yang didominasi oleh Provinsi Sulawesi Utara (96 pengaduan) dan Sulawesi Tenggara (35 pengaduan). Selengkapnya dapat dilihat di tabel 1a.

Tabel 1a		JENIS KEGIATAN/PROVINSI/STATUS/PROGRAM KOTAKU (NSUP) WILAYAH 2																																																																																																																																																																																																																																																											
		B	A	L	I	D	·	·	·	G	O	R	O	N	T	A	L	O	J	A	W	A	T	E	N	G	A	H	J	A	W	A	T	I	M	U	R	K	A	L	I	M	A	N	T	A	N	S	E	L	A	T	A	N	K	A	L	I	M	A	N	T	A	N	T	E	N	G	A	H	M	A	L	L	I	M	A	N	T	A	N	T	I	M	U	R	M	A	L	L	I	M	A	N	T	A	N	T	A	N	M	A	L	L	I	M	A	N	T	A	N	N	U	S	A	T	E	N	G	G	A	R	R	A	B	A	R	A	T	N	U	S	A	T	E	N	G	G	A	R	R	A	B	A	R	A	T	P	A	P	U	A	B	A	R	A	T	S	U	L	A	W	E	S	I	B	A	R	A	T	S	U	L	A	W	E	S	I	S	E	L	A	T	T	A	N	S	U	L	A	W	E	S	I	T	E	N	G	A	H	S	U	L	A	W	E	S	I	T	E	N	G	A	R	A	S	U	L	A	W	E	S	I	T	E	N	G	A	R	A	S	U	L	A	W	E	S	I	U	T	A	R	A	G	r	a	n	d	T	o	t	a	l
☒ Pencegahan & Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tingkat Kel/Desa		22	54	17	43	7	21	9	7	8	3	4	9	6	6	50	34	28	118	446																																																																																																																																																																																																																																									
Proses														1																																																																																																																																																																																																																																															
Selesai		22	54	17	43	7	21	9	7	8	3	4	9	5	6	50	34	28	118	445																																																																																																																																																																																																																																									
☒ Pencegahan & Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tingkat Kota		4	18	6	5	1	8	4	5	1	4	6	6	6	23	1	35	96	229																																																																																																																																																																																																																																										
Proses													5																																																																																																																																																																																																																																																
Selesai		4	18	6	5	1	8	4	5	1	4	6	1	6	23	1	35	96	224																																																																																																																																																																																																																																										
☒ PNPM Mandiri Perkotaan (Loan s.d Desember 2016)		1	6	3	8	4	2	4	4			5	2	1	5	17	1	23	15	101																																																																																																																																																																																																																																									
Proses										1																																																																																																																																																																																																																																																			
Selesai		1	6	3	8	4	2	4	3			5	2	1	5	17	1	23	15	100																																																																																																																																																																																																																																									
Grand Total		27	78	26	56	12	31	17	16	8	4	13	17	13	17	90	36	86	229	776																																																																																																																																																																																																																																									

Untuk pengaduan dalam pelaksanaan kegiatan program KOTAKU pencegahan dan peningkatan kumuh tingkat Kelurahan/Desa yang paling banyak diadakan adalah mengenai penyusunan & dokumen perencanaan RPLP/RTPLP/NUAP/RKM (150 pengaduan atau 33,6%) sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan pecegahan dan peningkatan kumuh tingkat Kabupaten/Kota yang paling banyak diadakan adalah mengenai penetapan pagu alokasi BDI (67 pengaduan atau 29,2%), untuk lokasi bekas dampingan PNPM Mandiri Perkotaan yang banyak diadakan adalah pelaksanaan kegiatan ekonomi (bergulir) (PNPM Mandiri Perkotaan) (37 pengaduan atau 36,6%).

Dari tanggal 01 s/d 31 Maret 2017. Pengaduan yang terjadi dari tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2017 sebanyak 776 pengaduan (selesai 769 (99%), proses 7 (1%) pengaduan).



Pada tabel 2 terlihat bahwa tidak ada pengaduan di Provinsi Papua (tanggal pengaduan kosong/tidak diisi).

A. Progres PPM di program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) Wilayah 2 Periode Maret 2017

1. Gambaran Umum

Progres ini merupakan rekapitulasi dokumen hasil PPM di Program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) wilayah 2 yang terjadi pada tanggal 01 Maret sampai dengan 31 Maret 2017, total pengaduan yang telah dikelola berjumlah 776 pengaduan. Dari total pengaduan tersebut status selesai sejumlah 769 (99%) pengaduan dan status proses sejumlah 7 (1%) pengaduan, berupa; pengaduan informatif sejumlah 771 (99,4%) [selesai 765 (99%), proses 6 (1%)] pengaduan. Sedangkan pengaduan masalah sejumlah 5 (0,6%) [selesai 4 (80%), proses 1 (20%)] pengaduan. Adapun selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3 jumlah pengaduan berdasarkan sifat pengaduan.

Tabel 3

Tabel Jumlah Pengaduan Berdasarkan Sifat Pengaduan (Informatif & Masalah) PROGRAM KOTAKU (NSUP) Wilayah 2 01 Maret 2017 - 31 Maret 2017				
INFORMATIF				
NO.	KATEGORI	SELESAI	PROSES	TOTAL
1	Kritik	20	-	20
2	Saran	43	-	43
3	Pertanyaan	702	6	708
Sub Total		765	6	771
MASALAH				
NO.	KATEGORI	SELESAI	PROSES	TOTAL
1	Mekanisme & Prosedur	2	-	2
2	Penyimpangan Dana	-	1	1
3	Intervensi Negatif	-	-	-
4	Perubahan Kebijakan	2	-	2
5	Kode Etik	-	-	-
6	Force Majeur	-	-	-
Sub Total		4	1	5
TOTAL		769	7	776
Persentase		99,1%	0,9%	

Sumber: Data SIM PPM 31 Maret 2017

Perbandingan jumlah Kelurahan/Desa dengan jumlah pengaduan per Provinsi yang di input mulai 01 Maret – 31 Maret 2017 (tanggal kejadian) berdasarkan Provinsi dengan jumlah kelurahan terbanyak, yaitu Provinsi Jawa Tengah (1983 Kelurahan) memperoleh 3% dan Provinsi dengan jumlah kelurahan sedikit, yaitu Provinsi Sulawesi Barat (17 Kelurahan) memperoleh 100%. (Lihat tabel 4)

Tabel 4
Perbandingan Jumlah Kelurahan Dengan Jumlah Pengaduan
Periode 01 - 31 Maret 2017 Program KOTAKU (NSUP) Wilayah 2

Provinsi	Jml Kel	Jml	Jml %	Selesai	Jml %	Proses	Jml %
Jawa Tengah	1.983	56	3	56	100,0	-	-
DI Yogyakarta	178	78	44	78	100,0	-	-
Jawa Timur	1.857	12	1	12	100,0	-	-
Bali	130	27	21	27	100,0	-	-
Nusa Tenggara Barat	219	13	6	13	100,0	-	-
Nusa Tenggara Timur	130	17	13	17	100,0	-	-
Kalimantan Tengah	41	17	41	17	100,0	-	-
Kalimantan Selatan	239	31	13	31	100,0	-	-
Kalimantan Timur	145	16	11	15	93,8	1	-
Sulawesi Utara	307	229	74,6	229	100,0	-	-
Sulawesi Tengah	58	36	62	36	100,0	-	-
Sulawesi Selatan	321	90	28	90	100,0	-	-
Sulawesi Tenggara	129	86	67	86	100,0	-	-
Gorontalo	73	26	36	26	100,0	-	-
Sulawesi Barat	17	17	100	17	100,0	-	-
Maluku	84	8	10	8	100,0	-	-
Maluku Utara	152	4	3	4	0,0	-	-
Papua Barat	41	13	32	7	53,8	6	-
Papua	39	-	-	-	0,0	-	-
Total	6.143	776	13	769	99,1	7	0,9

Adapun rata-rata pengaduan PROGRAM KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) Wilayah 2 periode 01 – 31 Maret 2017 sebesar 13%.

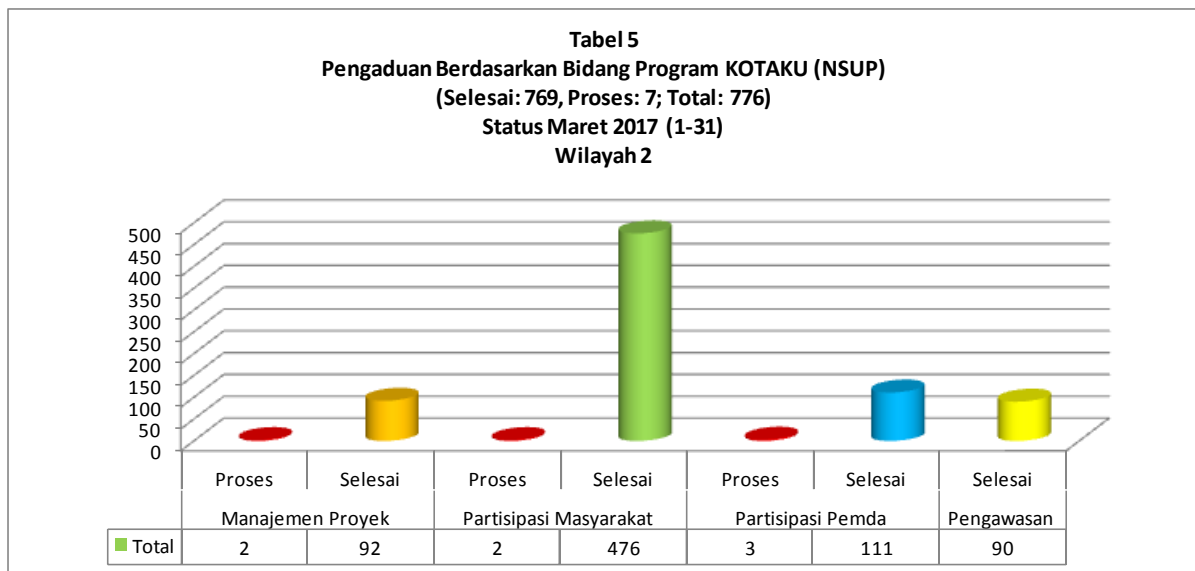
Sedangkan provinsi yang persentase pengaduan di bawah 10% berdasarkan tabel 4 adalah Jawa Tengah (3%), Jawa Timur (1%), Nusa Tenggara Barat (6%), dan Maluku Utara (3%), sedangkan Papua (tanggal pengaduan kosong).

Secara keseluruhan selama periode 01 – 31 Maret 2017 jumlah pengaduan yang masuk ada 776 pengaduan dengan tingkat penyelesaian 99,1%.

2. Pengaduan Berdasarkan Bidang Pengaduan

Berdasarkan bidang pengaduan dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu: (1) pengawasan, (2) manajemen proyek, (3) partisipasi Pemda, dan (4) partisipasi masyarakat. Bidang pengaduan tersebut tercakup dalam lingkup administrasi teknis dan keuangan. Adapun lingkup administrasi teknis mencakup seluruh pengaduan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh). termasuk administrasi penyaluran BDI (bantuan dana investasi). Sedangkan lingkup keuangan mencakup seluruh pengaduan yang berkaitan dengan pembayaran dan pemanfaatan kegiatan program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) di wilayah masing-masing.

Pada tabel 5 untuk pengaduan dalam kategori bidang manajemen proyek sebanyak 94 pengaduan (selesai 92 (97,9%), proses 2 (2,1%) pengaduan); bidang partisipasi masyarakat sebanyak 478 pengaduan (selesai 476 (99,6%), proses 2 (0,4%) pengaduan); bidang partisipasi Pemda sebanyak 114 pengaduan (selesai 111 (97,4%), proses 3 (2,6%) pengaduan); dan bidang pengawasan sebanyak 90 pengaduan (selesai 90 (100%), proses 0 (0%) pengaduan).



Selengkapnya lihat tabel 5a per provinsi.

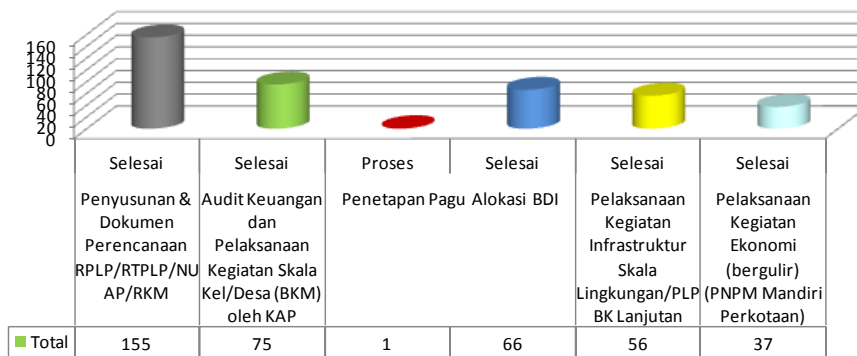
Tabel 5a		BIDANG/PROVINSI/STATUS/PROGRAM KOTAKU (NSUP) WILAYAH 2																	
	BALI	D.I.YOGYAKARTA	GORONTALO	JAWA TENGAH	JAWA TIMUR	KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN TIMUR	MALUKU	MALUKU UTARA	NUSATENGGARA BARAT	NUSATENGGARA TIMUR	PAPUABARAT	SULAWESI BARAT	SULAWESI SELATAN	SULAWESI TENGAH	SULAWESI UTARA	Grand Total	
<input checked="" type="checkbox"/> Manajemen Proyek	1	12	1	3		4	4	3				2	2	2	6		13	41	94
Proses													2						2
Selesai	1	12	1	3		4	4	3				2	2	6		13	41	92	
<input checked="" type="checkbox"/> Partisipasi Masyarakat	18	47	17	32	8	18	13	11	8	3	9	10	8	9	66	35	51	115	478
Proses								1					1						2
Selesai	18	47	17	32	8	18	13	10	8	3	9	10	7	9	66	35	51	115	476
<input checked="" type="checkbox"/> Partisipasi Pemda	2	6	4	3	1	2		1		1	4	5	3	6	16	1	20	39	114
Proses													3						3
Selesai	2	6	4	3	1	2		1		1	4	5		6	16	1	20	39	111
<input checked="" type="checkbox"/> Pengawasan	6	13	4	18	3	7		1							2		2	34	90
Selesai	6	13	4	18	3	7		1						2		2	34	90	
Grand Total	27	78	26	56	12	31	17	16	8	4	13	17	13	17	90	36	86	229	776

3. Pengaduan berdasarkan Sifat Pengaduan

Berdasarkan sifat pengaduan, maka pengelolaan pengaduan masyarakat pada program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) ada dua (2), yaitu Informatif dan Masalah. Yang dimaksud dengan pengaduan informatif adalah pengaduan yang berupa kritik, saran serta pertanyaan. Jadi ketiga unsur pengaduan informatif tersebut **harus** dimasukkan dalam format manual PPM berbasis Ms. Excel. Demikian juga dengan pengaduan yang bersifat masalah adalah pengaduan yang yang terkait dengan unsur mekanisme & prosedur, penyimpangan dana, intervensi negatif, perubahan kebijakan, kode etik, dan force majeure.

Berdasarkan data pada bulan Maret 2017 untuk kategori yang bersifat pengaduan informatif dengan 5 (lima) tema pengaduan dominan sebanyak 390 pengaduan dan tema lainnya sebanyak 381 pengaduan (total 771 pengaduan). Lihat tabel 6.

Tabel 6
5 (lima) tema Pengaduan Dominan Berdasarkan Sifat Aduan *Informatif* dan Sub Bidang Sebanyak 390 Pengaduan dan Tema Lainnya sebanyak 381 pengaduan total 771 pengaduan
Tanggal 01 Maret s.d 31 Maret 2017
Program KOTAKU (NSUP) Wilayah 2

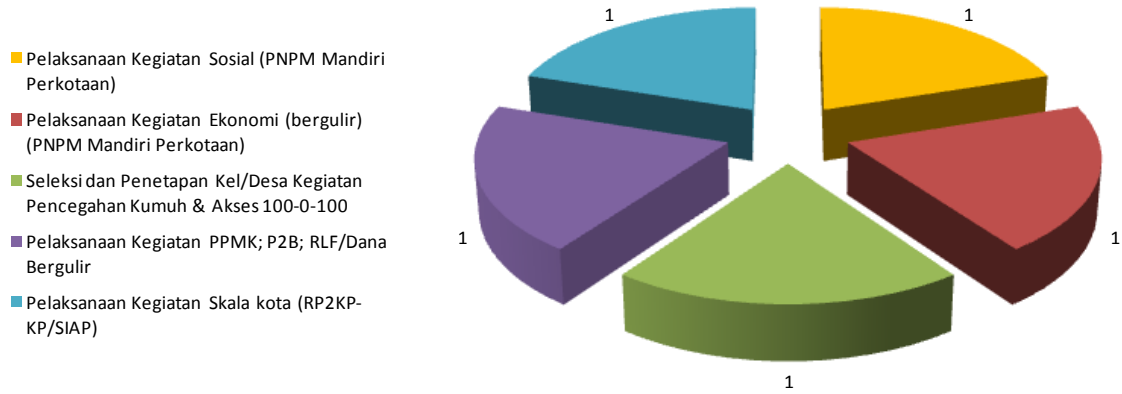


Selengkapnya lihat tabel 6a per provinsi.

Tabel 6a INFORMATIF/SUB BIDANG/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU (NSUP) WILAYAH 2	BALI	D I R Y O G Y A K A R T A	G O R O N T A L O	J A W A T E N G A H	J A W A T I M U R	K A L I M A N T A N	K A L I M A N T A N	K A L I M A N T A N	M A L U K U	M A L U K U	M A L U K U	N U S A T E N G G A R A	N U S A T E N G G A R A	P A P U A B A R A T	S U L A W E S I B A R A T	S U L A W E S I S E L A T A N	S U L A W E S I T E N G G A R A	S U L A W E S I T E N G G A R A	S U L A W E S I U T A R A	G r a n d T o t a l
	Penyusunan & Dokumen Perencanaan RPLP/RTPLP/NUAP/RKM	7	24	2	11	1	13	3	4	1	2	2	3			16	24	14	28	155
Audit Keuangan dan Pelaksanaan Kegiatan Skala Kel/Desa (BKM) oleh KAP	5	10	3	18	3	5			2										29	75
Penetapan Pagu Alokasi BDI	1	11	1	2		2	4					1	1				4	11	29	67
Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan/PLPBK Lanjutan	1	2	1	4					2					2	4	5	2	4	29	56
Pelaksanaan Sosialisasi Awal (Kel/Desa, Kab/Kota dan Provinsi)		1										3		1	1	4		2	25	37
Grand Total	14	48	7	35	4	20	7	4	5	2	5	4	4	4	5	29	26	31	140	390

Pada kategori yang bersifat masalah pada bulan Maret 2017 pengaduan sebanyak 5 pengaduan (selesai 4 (80%), proses 1 (20%) pengaduan). Lihat tabel 7.

Tabel 7
Pengaduan Berdasarkan Sifat Aduan *Masalah* dan Sub Bidang
total 5 pengaduan
Tanggal 01 Maret s.d 31 Maret 2017
Program KOTAKU (NSUP) Wilayah 2



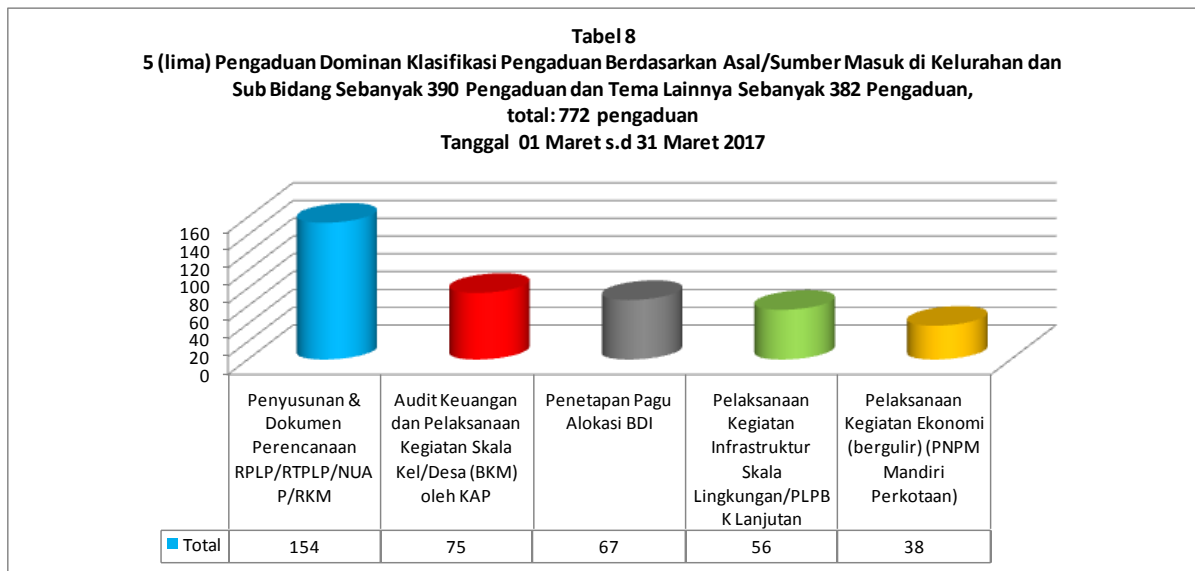
Selengkapnya lihat tabel 7a per provinsi.

MASALAH/SUB BIDANG/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU (NSUP) WILAYAH 2	J A W A T E N G A H	K A L I M A N T A N T I M U R	S U L A W E S I U T A R A	G r a n d T o t a l
Pelaksanaan Kegiatan Sosial (PNPM Mandiri Perkotaan)	1			1
Pelaksanaan Kegiatan Ekonomi (bergulir) (PNPM Mandiri Perkotaan)		1		1
Seleksi dan Penetapan Kel/Desa Kegiatan Pencegahan Kumuh & Akses 100-0-100			1	1
Pelaksanaan Kegiatan PPMK; P2B; RLF/Dana Bergulir			1	1
Pelaksanaan Kegiatan Skala kota (RP2KP-KP/SIAP)	1			1
Grand Total	2	1	2	5

4. Pengaduan berdasarkan Asal/Sumber Masuk

Yang dimaksud dengan pengaduan berdasarkan sumber masuk adalah lokasi dimana pengaduan tersebut berasal. Lokasi/keberadaan sumber masuk pengaduan terdiri dari 5 (lima) sumber, yaitu: di Kelurahan, Kecamatan, Kab/Kota, Provinsi, dan Pusat.

Pengaduan berdasarkan sumber masuk adalah lokasi dimana pengaduan tersebut berasal, klasifikasi pengaduan berdasarkan asal/sumber masuk di Kelurahan pada bulan Maret 2017 dengan 5 (lima) pengaduan dominan ada 390 pengaduan dan tema lainnya ada 382 pengaduan (total selesai 772 pengaduan).



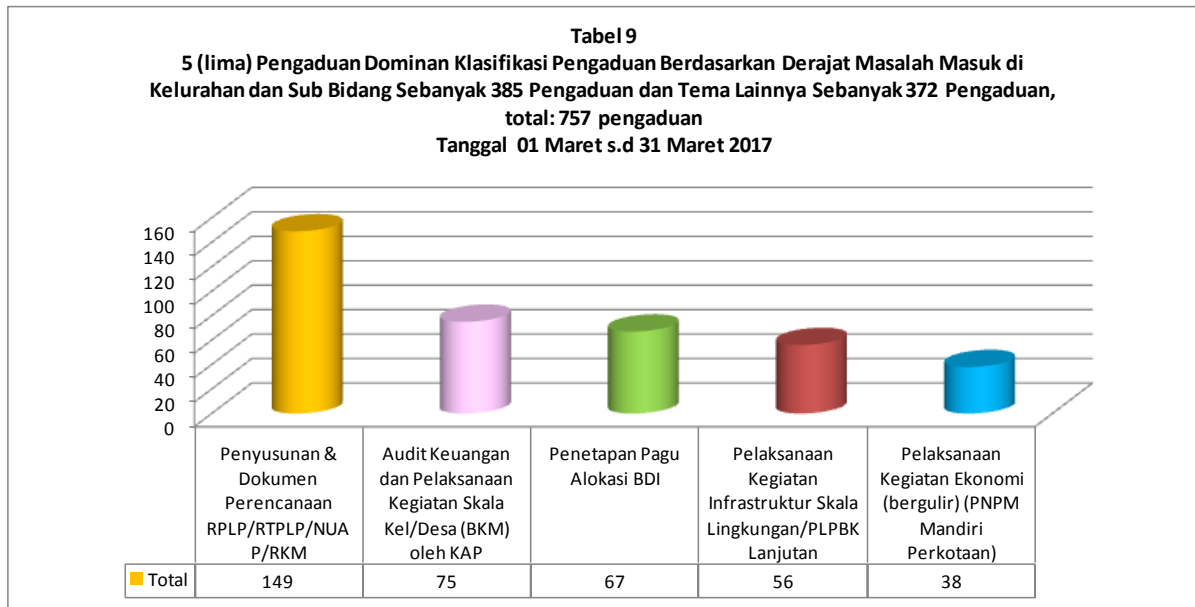
Selengkapnya lihat tabel 8a per provinsi.

SUMBER ADUAN/SUB BIDANG/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU (NSUP) WILAYAH 2	Tabel 8a																Grand Total					
	BAL	DIA	GORONTALO	JAWA TENGAH	JAWA TIMUR	KALIMANTAN	KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN TIMUR	MALUKU	MALUKU UTARA	NUSANTENGGARA	NUSANTENGGARA BARAT	NUSANTENGGARA TIMUR	PAPUA	PAPUA BARAT		SULAWESI	SULAWESI SELATAN	SULAWESI TENGAH	SULAWESI UTARA	
Penyusunan & Dokumen Perencanaan RPLP/RTPLP/NUAP/RKM	7	24	2	11	1	13	3	3	1	2	2	3					16	24	14	28	154	
Audit Keuangan dan Pelaksanaan Kegiatan Skala Kel/Desa (BKM) oleh KAP	5	10	3	18	3	5			2					1	1						29	75
Penetapan Pagu Alokasi BDI	1	11	1	2		2	4														11	67
Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan/PLPB Lanjutan	1	2	1	4					2					2	4	5	2	4			29	56
Pelaksanaan Kegiatan Ekonomi (bergulir) (PNPM Mandiri Perkotaan)		2	3	1	1			1				2	1		5	4	1	4			13	38
Grand Total	14	49	10	35	5	21	7	4	5	2	4	5	3	9	29	27	33	128	390			

5. Pengaduan berdasarkan Derajat Masalah

Derajat masalah menggambarkan tingkat/jenjang di mana pengaduan seharusnya dapat dikelola untuk mendapatkan solusi/penyelesaian yang menguntungkan semua pihak. Derajat masalah juga menggambarkan tingkat otoritas atau kewenangan dalam memfasilitasi pengaduan. Walaupun begitu jenjang dibawahnya tetap dilibatkan dalam memfasilitasi pengaduan. Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka pengaduan terbagi dalam lima tingkatan, yaitu : Derajat 1: tingkat Kelurahan/Desa. Derajat 2: tingkat Kecamatan. Derajat 3: tingkat Kabupaten/Kota. Derajat 4: tingkat KMW/Propinsi dan Derajat 5: Tingkat Pusat.

Pada bulan Maret 2017 penanganan pengaduan terbanyak pada tingkat kelurahan dengan 5 (lima) pengaduan dominan sejumlah 385 pengaduan dan tema lainnya sejumlah 372 pengaduan (total 757 pengaduan).



Tabel 9a di bawah berdasarkan per provinsi.

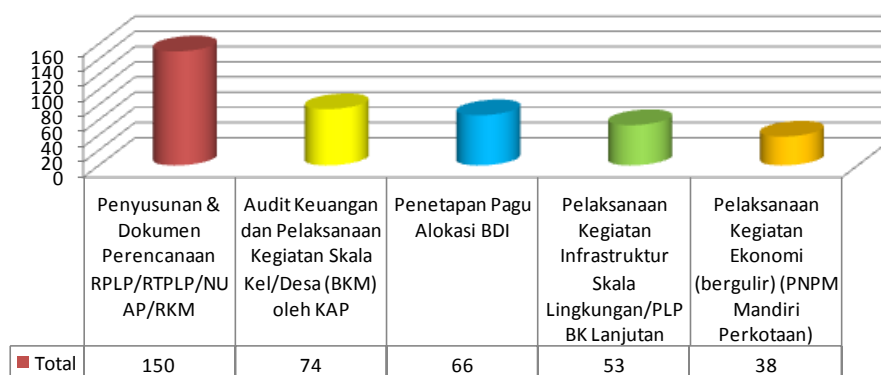
DERAJAT/SUB BIDANG/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU (NSUP) WILAYAH 2	Tabel 9A															Grand Total			
	BALI	DIYOGYAKARTA	GORONTALO	JAWATENGGAH	JAWATIMUR	KALIMANTANSELAGAH	KALIMANTANTENGAH	KALIMANTANTIMUR	MALUKU	MALUKUTARA	NUSATENGGARA	NUSATENGGARATIMUR	PAPUABARAT	SULAWESI BARAT	SULAWESI SELATAN		SULAWESI TENGAH	SULAWESI UTARA	
Penyusunan & Dokumen Perencanaan RPLP/RTPLP/NUAP/RKM	5	24	2	11	1	13	3	1	2	2	3			16	24	14	28	149	
Audit Keuangan dan Pelaksanaan Kegiatan Skala Kel/Desa (BKM) oleh KAP	5	10	3	18	3	5		2										29	75
Penetapan Pagu Alokasi BDI	1	11	1	2		2	4				1	1			4		11	29	67
Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan/PLPBK Lanjutan	1	2	1	4				2					2	4	5	2	4	29	56
Pelaksanaan Kegiatan Ekonomi (bergulir) (PNPM Mandiri Perkotaan)		2	3		1	1		1		2	1		5	4	1	4	13	38	
Grand Total	12	49	10	35	5	21	7	1	5	2	4	5	3	9	29	27	33	128	385

6. Pengaduan Berdasarkan Media Penyampaian

Untuk mempermudah dalam menyampaikan pengaduan, setidaknya telah disediakan tigabelas media untuk mengadu, media tersebut terdiri atas: Tatap Langsung, Buku Pengaduan, Kotak Pengaduan, Telepon, SMS, Faksimil, Surat, Email, Pengaduan On-Line, Kunjungan Lapangan/Supervisi, Facebook, Twitter, dan Instagram.

Berdasarkan data pada bulan Maret 2017 pengaduan yang paling banyak menggunakan media penyampaian pengaduan berupa tatap langsung/muka dengan 5 (lima) tema dominan pengaduan sejumlah 381 pengaduan dan tema lainnya sejumlah 376 pengaduan (total 757 pengaduan).

Tabel 10
5 (lima) Pengaduan Dominan Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Media Aduan (Tatap Langsung) dan Sub Bidang Sebanyak 381 Pengaduan dan Tema Lainnya Sebanyak 376 Pengaduan, total: 757 pengaduan
Tanggal 01 Maret s.d 31 Maret 2017



Tabel 10a di bawah berdasarkan per provinsi.

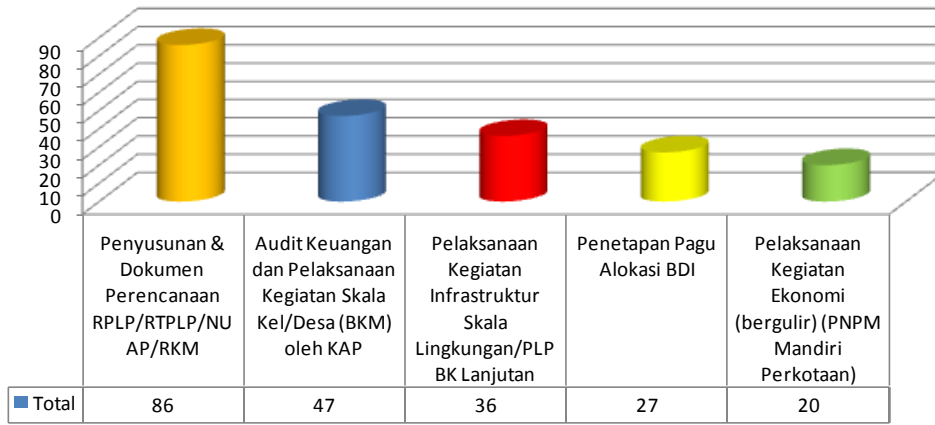
MEDIA ADUAN/SUB BIDANG/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU (NSUP) WILAYAH 2	Grand Total																		
	BALIK PANGRAJENE	DIA YOGYAKARTA	GORONTALO	JAWA TENGAH	JAWA TIMUR	KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN UTARA	MALUKU	MALUKU UTARA	NUSABARRA	NUSATENGGARA	PAPUABARRA	SULAWESI BARRA	SULAWESI SELATAN	SULAWESI TENGGARA	SULAWESI UTARA		
Penyusunan & Dokumen Perencanaan RPLP/RTPLP/NUAP/RKM	6	24	2	11	1	13	2	1	1	2	2	3		16	24	14	28	150	
Audit Keuangan dan Pelaksanaan Kegiatan Skala Kel/Desa (BKM) oleh KAP	5	10	3	18	3	5			2									28	74
Penetapan Pagu Alokasi BDI	1	11	1	2		2	3				1	1		4		11	29	66	
Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan/PLPBK Lanjutan	1	2	1	3					2				2	4	5	2	4	27	53
Pelaksanaan Kegiatan Ekonomi (bergulir) (PNPM Mandiri Perkotaan)		2	3		1	1		1			2	1		5	4	1	4	13	38
Grand Total	13	49	10	34	5	21	5	2	5	2	4	5	3	9	29	33	125	381	

7. Pengaduan Berdasarkan Pelaku Yang Diadukan

Untuk mengetahui pelaku yang diadukan terdapat 9 pilihan terdiri atas: KSM, BKM/LKM, Aparat Kelurahan/Kecamatan, Aparat Kabupaten/Kota/Provinsi, Faskel/SF, Korkot, KMW/OC/OSP, KMP/Proyek, dan Kontraktor/Jasa Konsultan.

Berdasarkan data pada bulan Maret 2017 pengaduan yang paling banyak berdasarkan pelaku yang diadukan adalah Fasilitator Kelurahan/Senior Fasilitator (Faskel/SF) dengan 5 (lima) tema dominan pengaduan sejumlah 216 pengaduan dan tema lainnya sejumlah 146 pengaduan (total 362 pengaduan).

Tabel 11
5 (lima) Tema Dominan Klasifikasi pengaduan berdasarkan pelaku yang diadukan (Faskel/SF)
dan Sub Bidang Sebanyak 216 Pengaduan dan Tema Pengaduan Lainnya Sebanyak 146
Pengaduan, total: 362 pengaduan
Tanggal 01 Maret s.d 31 Maret 2017



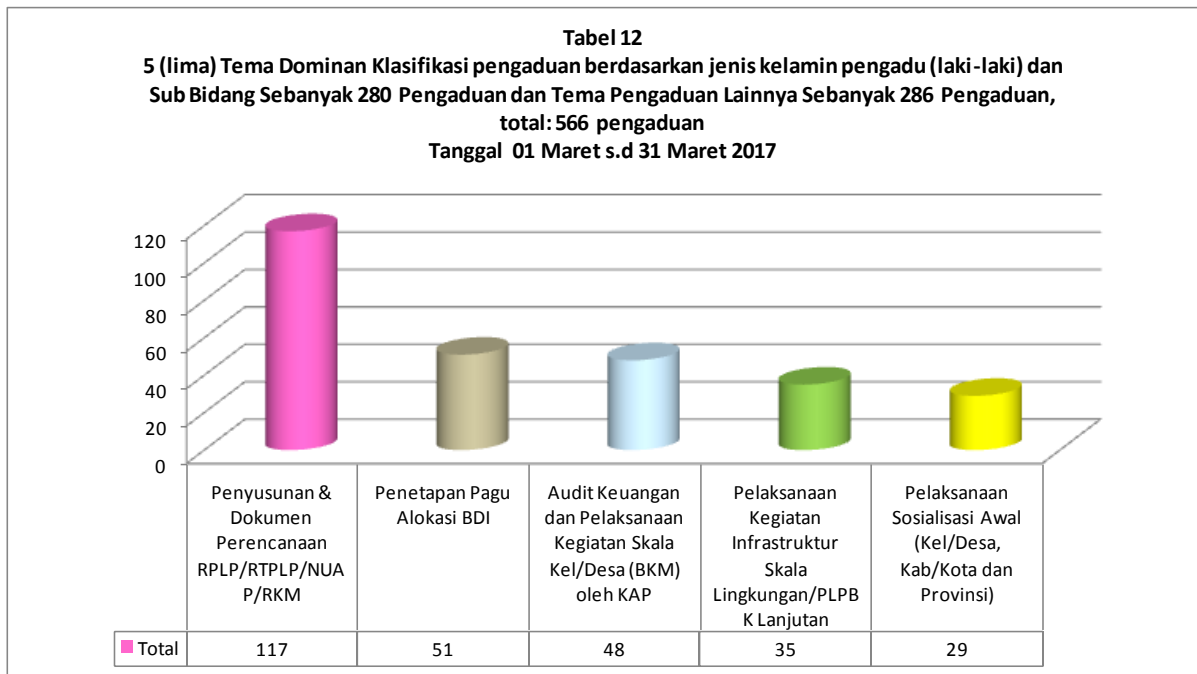
Tabel 11a di bawah berdasarkan per provinsi.

PELAKU YANG DIADUKAN/SUB BIDANG/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU (NSUP) WILAYAH 2	Tabel 11A											Grand Total		
	BAL I	D . I . Y O G Y A K A R T A	J A W A T E N G G A H	J A W A T I M U R	K A L I M A N T A N	K A L I M A N T A N	M A L L U K U	N U S A T E N G G A R A	P A P U A B A R A T	S U L A W E S I	S U L A W E S I		S U L A W E S I	
Penyusunan & Dokumen Perencanaan RPLP/RTPLP/NUAP/RKM		19	4		13	3	1	1		12	9	3	21	86
Audit Keuangan dan Pelaksanaan Kegiatan Skala Kel/Desa (BKM) oleh KAP	1	8	16	1	4		2						15	47
Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan/PLPBK Lanjutan	1	1	4						1	4	1	2	22	36
Penetapan Pagu Alokasi BDI			1	2		2				1		7	14	27
Pelaksanaan Kegiatan Ekonomi (bergulir) (PNPM Mandiri Perkotaan)		2		1	1		1		1	1			13	20
Grand Total	2	31	26	2	20	3	3	2	1	18	11	12	85	216

8. Pengaduan Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk pengaduan berdasarkan jenis kelamin terdapat 3 pilihan terdiri atas: Laki-laki, Perempuan, dan Tidak diketahui.

Berdasarkan data pada bulan Maret 2017 pengaduan berdasarkan jenis kelamin pengadu adalah Laki-laki dengan 5 (lima) tema dominan pengaduan sejumlah 280 pengaduan dan tema lainnya sejumlah 286 pengaduan (total 566 pengaduan).



Tabel 12a di bawah berdasarkan per provinsi.

Tabel 12A

JENIS KELAMIN PENGADU/SUB BIDANG/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU WILAYAH 2

	BAL	DIA	GORONTALO	JAWA TENGAH	JAWA TIMUR	KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN UTARA	MALUKU	MALUKU UTARA	NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA TIMUR	PAPUA BARAT	SULAWESI BARAT	SULAWESI SELATAN	SULAWESI TENGAH	SULAWESI UTARA	Grand Total	
Penyusunan & Dokumen Perencanaan RPLP/RTPLP/NUAP/RKM	5	19	2	11	1	11	3	1	1	1	2	1		13	20	11	15	117	
Penetapan Pagu Alokasi BDI	1	9	1	2		2	4					1			3		8	20	51
Audit Keuangan dan Pelaksanaan Kegiatan Skala Kel/Desa (BKM) oleh KAP	4	9		12	3	2			2										48
Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan/PLPB Lanjutan		2	1	2					1				1	4	3	2	4		35
Pelaksanaan Sosialisasi Awal (Kel/Desa, Kab/Kota dan Provinsi)		1									3		1	1	2		2		29
Grand Total	10	40	4	27	4	15	7	1	4	1	5	2	2	5	21	22	25	85	280

Penutup

Dalam laporan bulan Maret 2017 ini dapat disampaikan bahwa Program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) wilayah 2 (dua) berjumlah 776 pengaduan (selesai 769 (99%), proses 7 (1%) pengaduan), sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan program KOTAKU pencegahan & peningkatan kumuh tingkat kota pengaduannya didominasi oleh Provinsi Sulawesi Utara (96 pengaduan) dan Sulawesi Tenggara (35 pengaduan).

Adapun untuk pengaduan dalam pelaksanaan kegiatan program KOTAKU pencegahan dan peningkatan kumuh tingkat Kelurahan/Desa yang paling banyak diadakan adalah mengenai penyusunan & dokumen perencanaan RPLP/RTPLP/NUAP/RKM (150 pengaduan atau 33,6%) sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan pecegahan dan peningkatan kumuh tingkat Kabupaten/Kota yang paling banyak diadakan adalah mengenai penetapan pagu alokasi BDI (67 pengaduan atau 29,2%), untuk lokasi bekas dampingan PNPM Mandiri Perkotaan yang banyak diadakan adalah pelaksanaan kegiatan ekonomi (bergulir) (PNPM Mandiri Perkotaan) (37 pengaduan atau 36,6%).

Sedangkan mengenai pengaduan yang bersifat informatif sejumlah 771 (99,4%) [selesai 765 (99%), proses 6 (1%)] pengaduan. Sedangkan pengaduan masalah sejumlah 5 (0,6%) [selesai 4 (80%), proses 1 (20%)] pengaduan.

Bila dilihat dalam perbandingan jumlah Kelurahan/Desa dengan jumlah pengaduan per Provinsi yang di input mulai 01 Maret – 31 Maret 2017 (tanggal kejadian) berdasarkan Provinsi dengan jumlah kelurahan terbanyak, yaitu Provinsi Jawa Tengah (1983 Kelurahan) memperoleh 3% dan Provinsi dengan jumlah kelurahan sedikit, yaitu Provinsi Sulawesi Barat (17 Kelurahan) memperoleh 100%.

Sedangkan rata-rata pengaduan program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) Wilayah-2 periode 01 – 31 Maret 2017 sebesar 13%.

Adapun Provinsi yang persentase pengaduan di bawah 10% berdasarkan tabel 4 adalah Jawa Tengah (3%), Jawa Timur (1%), Nusa Tenggara Barat (6%), dan Maluku Utara (3%), sedangkan Papua (tanggal pengaduan kosong).

Untuk secara keseluruhan selama periode 01 – 31 Maret 2017 jumlah pengaduan yang

masuk ada 776 pengaduan dengan tingkat penyelesaian 99,1%.

Pengaduan dalam kategori bidang manajemen proyek sebanyak 94 pengaduan (selesai 92 (97,9%), proses 2 (2,1%) pengaduan); bidang partisipasi masyarakat sebanyak 478 pengaduan (selesai 476 (99,6%), proses 2 (0,4%) pengaduan); bidang partisipasi Pemda sebanyak 114 pengaduan (selesai 111 (97,4%), proses 3 (2,6%) pengaduan); dan bidang pengawasan sebanyak 90 pengaduan (selesai 90 (100%), proses 0 (0%) pengaduan).

Pada laporan PPM ini telah seluruh Provinsi mengirimkan data pengaduannya tetapi masih ada OSP Provinsi yang tanggal pengaduannya kosong. Untuk kenyamanan penginputan data, PPM Pusat berusaha untuk memperbaiki format isian manual PPM agar menjadi lebih mudah.